

PENGGALANGAN PARA MANTAN NARAPIDANA TERORIS GUNA MENCEGAH RADIKALISME DAN TERORISME DI PROVINSI SUMATERA UTARA

THE INTELLIGENCE CONDITIONING FOR EX-TERRORISM CONVICTS TO PREVENT RADICALISM AND TERRORISM IN NORTH SUMATERA

Satya Dharma Pardede¹

Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (SESKOAL)
(satyadharmap@gmail.com)

Abstrak – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menjadi lembaga yang memberi perhatian pada terorisme sebagai akibat dari paham radikalisme. Berdasarkan keterangan dari BNPT, dari sekitar 600 orang mantan narapidana teroris (Napiter) yang sudah bebas, beberapa diantaranya kembali melakukan aksi terorisme. Hal ini menjadi perhatian khusus aparat keamanan, khususnya Badan Intelijen Negara (BIN), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam mencegah aksi-aksi terorisme. Selain itu terdapat beberapa daerah yang menjadi lokasi terealisasinya aksi terorisme, salah satunya di provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menggambarkan kegiatan penggalangan kepada mantan narapidana terorisme (Napiter) oleh pihak terkait dalam mencegah penyebaran paham radikalisme yang berujung kepada tindakan terorisme di wilayah Sumatera Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan teori penggalangan, teori deradikalisasi, dan teori sinergitas. Data yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi kemudian dianalisis menggunakan Nvivo sebagai alat bantu untuk mengkategorikan dan mempermudah dalam mendeskripsikan permasalahan serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggalangan kepada mantan narapidana terorisme sudah bekerjasama dengan beberapa pihak dalam penyelenggaraan intelijen negara di daerah, meliputi BIN, TNI, Polri, dan pemerintah daerah setempat. Dalam pelaksanaannya, para napiter diberikan penyuluhan dan sosialisasi terkait nasionalisme, wawasan kebangsaan, keagamaan dan kewirausahaan. Kegiatan tersebut dilaksanakan ketika di dalam Lembaga Perasyarakatan (LP) oleh pihak LP dan kepolisian maupun setelah keluar LP dengan pemantauan dari BIN, TNI, Polri dan pemerintah daerah. Selain itu, proses penggalangan ketika napiter sudah bebas tetap diberikan perhatian khusus melalui silaturahmi ke rumah-rumah napiter dengan komunikasi persuasif oleh aparat setempat. Selanjutnya juga diberikan pendampingan kewirausahaan dan usaha mandiri oleh pemerintah daerah, serta sosialisasi terkait bahaya hoaks dalam dunia digital baik dari *gadget* ataupun media lain. Deradikalisasi secara mendasar sudah dilaksanakan oleh pihak BNPT dengan mensinergikan semua pihak dari lembaga-lembaga lain. Berdasarkan kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan tersebut menjadikan satu pertimbangan dan contoh nyata bahwa penggalangan dapat mencegah menyebarnya paham radikalisme dan aksi terorisme di masyarakat.

Kata Kunci: penggalangan intelijen, para mantan napiter, radikalisme, terorisme

¹ Program Studi Strategi Operasi Laut, Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (SESKOAL).

Abstract – The Agency of National Counterterrorism (BNPT) is an institution that is concerned about terrorism as a result of radicalism. Based on information from the BNPT, of the approximately 600 ex-convict terrorist who have been released, some of them have returned to committing acts of terrorism. This is of particular concern to the security apparatus, particularly the National Intelligence Agency (BIN), the Indonesian National Armed Forces (TNI) and the Indonesian National Police (Polri), in preventing acts of terrorism. In addition, several areas have become locations for the realization of acts of terrorism, one of them is in the province of North Sumatera. This research aims to analyze and describe the intelligence conditioning activities for ex-terrorism convicts (Napiter) by related parties in preventing the spread of radicalism that leads to acts of terrorism in North Sumatera. The method used in this research is the theory of raising approaches, deradicalization theory, and synergies theory. Data was collected through interviews and observations, then was analyzed using NVIVO as a tool to categorize and make it easier to describe problems and draw conclusions. The results showed that intelligence conditioning for ex-convict terrorists have collaborated with several parties in the implementation of State Intelligence in the regions, including the BIN, TNI, Polri, and the regional government. In its implementation, terror convicts are given counseling and socialization related to nationalism, national insight, religion, and entrepreneurship. These activities are carried out while in the Correctional Institution (LP) by the LP and the police as well as after leaving the prison with monitoring from BIN, TNI, Polri, and regional governments. Besides, the process of intelligence conditioning when ex-convict terrorists are free will still have special attention through hospitality to terror convictions with persuasive communication by local officials. Furthermore, they are also given entrepreneurship assistance and independent business by local governments, as well as socialization related to the dangers of hoaxes in the digital world either from gadgets or other media. BNPT has fundamentally implemented deradicalization by synergizing all parties from other institutions. Based on the activities that have been carried out, it becomes a consideration and a concrete example that intelligence conditioning can prevent the spread of radicalism and acts of terrorism in society.

Keywords: intelligence conditioning, ex-terrorism convicts, radicalism, terrorism

Pendahuluan

Sebagai sebuah aksi kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*), terorisme bukan saja mengancam kedamaian manusia, melainkan juga seluruh nilai-nilai luhur yang melekat pada kemanusiaan. Dari banyak studi dan penelitian terkait dengan terorisme, ditemukan bahwa aksi brutal dan kekejaman yang dilakukan kelompok teroris hanyalah salah satu bagian dari upaya untuk menyebarkan ketakutan kepada masyarakat luas. Dengan kata lain, objek terorisme bukan saja orang yang secara langsung mengalami aksi kekerasan, tetapi juga masyarakat luas yang menyaksikan atau mendengar kabar

tentang aksi kekerasan tersebut.² Aksi kejahatan tersebut semakin jelas menjadi ancaman bagi peradaban modern. Hal ini karena pertumbuhan kelompok dengan paham radikal yang memunculkan aksi terorisme tersebut semakin berkembang dan menyebar secara luas. Dibuktikan sepanjang tahun 2019, Indonesia dikejutkan dengan sejumlah aksi teror. Teror yang dilakukan para terduga teroris tersebut didominasi oleh peristiwa ledakan bom bunuh diri. Setidaknya, terdapat lima peristiwa teror yang menjadi perhatian publik selama 2019 yaitu bom Sibolga, bom bunuh diri di Pos Polisi Kartasura, penyerangan di Polsek Wonokromo, penusukan Wiranto dan

² Agus Surya Bakti, *Deradikalisasi Dunia Maya*, (Jakarta: Daulat Press, 2016), hlm. 59.

aksi teror bom bunuh diri di Polrestabes Medan.³

Terkait aksi tersebut tidak menutup kemungkinan sebagian besar masyarakat di Indonesia khawatir jika aksi tersebut terulang kembali di Indonesia. Kekhawatiran tersebut menjadikan pihak penegak hukum dan lembaga yang berwenang dalam penanggulangan terorisme bekerja lebih ekstra untuk menanggulangnya. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) selaku lembaga yang berwenang penuh dalam penanggulangan terorisme, mulai dari pencegahan dan penanggulangan. Pada tahun 2018 dalam acara penandatanganan nota kesepahaman bersama antara BNPT dan Kementerian Dalam Negeri terkait dengan pencegahan teroris, dari sekitar 600 orang mantan narapidana teroris (Napiter) yang sudah bebas, diketahui ada tiga orang yang mengulangi lagi perbuatannya. Kasus-kasus serangan terorisme di Indonesia seperti kasus di Thamrin, Cicendo dan Kalimantan Timur telah mengungkap peran mereka, para tokoh dan pengikut ISIS yang masih berada di balik penjara maupun sudah keluar penjara.⁴ Selain itu, tren penanganan perkara tindak pidana terorisme di Indonesia saat ini masih

³ Devina Halim, "KALEIDOSKOP 2019: Sejumlah Teror yang Guncang Indonesia, Bom Bunuh Diri hingga Penusukan Wiranto", dalam <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/25/07485601/kaleidoskop-2019-sejumlah-teror-yang-guncang-indonesia-bom-bunuh-diri-hingga?page=all>, 25 Desember 2019, diakses pada 25 November 2020.

⁴ Amirullah, "BNPT Minta Pemda Bantu 600 Mantan Teroris Cari Pekerjaan", dalam <https://nasional.tempo.co/read/1068986/bnpt-minta-pemda-bantu-600-mantan-teroris-cari-pekerjaan>, 12 Maret 2018, diakses pada 15 April 2020.

terbilang cukup tinggi, yaitu sebanyak 114 kasus terjadi sepanjang tahun 2019. Tingginya kasus tindak pidana terorisme tersebut mengharuskan pihak yang bertugas mengatasi aksi terorisme lebih memperkuat strateginya. Salah satunya adalah TNI yang salah satu tugasnya adalah mengatasi aksi terorisme dengan strategi operasi dalam bentuk pelibatan TNI kepada Polri atau operasi mandiri TNI yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu penangkapan, penindakan, dan rehabilitasi.

Tahapan pelaksanaan operasi untuk mengatasi aksi terorisme yang paling berat dan membutuhkan komitmen dan kekonsistenan adalah pada tahapan rehabilitasi. TNI pun memiliki satuan tersendiri dalam satuan intelijen maupun satuan komando wilayah yang bertugas dalam penangkalan dan rehabilitasi. Selain itu, dalam pelaksanaannya juga bekerjasama dengan Polri dan Badan Intelijen Negara di daerah ataupun pusat yang melakukan tugas deteksi dan pencegahan dini sebagai pelaksana fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Penggalangan adalah upaya, aktivitas, pekerjaan dan tindakan yang dilaksanakan secara bertahap dan terencana serta terus menerus dalam serangkaian kegiatan intelijen untuk membina, mengarahkan dan mengkondisikan suatu lingkungan dengan segala potensinya agar tercipta kondisi yang kondusif sesuai yang diharapkan.⁵

⁵ RM Suropto, *Kegiatan Intelijen Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan (Intelijen sebagai Indera dan Pisau Analisis)*, (Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 2010), hlm. 279.

Kegiatan utama yang sering dilaksanakan dalam melakukan pendeteksian dan pencegahan dini terhadap terorisme adalah deradikalisasi, disebabkan aksi terorisme selalu berakar pada paham radikalisme sehingga faktor utamanya adalah pemahaman dan pemikiran dari pelaku terorisme. Radikalisme adalah pemahaman atau pemikiran dari suatu aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik (mengatasnamakan agama Islam) dengan cara kekerasan dan pemaksaan.⁶ Menurut Peneliti Pusat Kajian Terorisme dan Konflik Sosial Universitas Indonesia, Solahudin mengemukakan bahwa sulit menentukan apakah program deradikalisasi berhasil atau gagal. Program yang dirintis sejak tahun 2002 itu tidak punya basis data sebagai referensi. Setidaknya terdapat 3 kelemahan dalam program deradikalisasi yaitu pertama, orang yang menjadi objek deradikalisasi tidak pernah diukur tingkat radikalismenya, tidak bisa dibandingkan sebelum diintervensi dan sesudah diintervensi.⁷ Kelemahan program deradikalisasi yang kedua adalah sasaran program yang tidak tepat, yang dideradikalisasi adalah orang yang sudah *disengagement* atau orang yang sudah berkomitmen tidak melakukan kekerasan lagi. Kelemahan yang ketiga adalah keterbatasan kekuatan BNPT sebagai *stakeholder* terkait. Direktur BNPT, Irfan

⁶ Walter Reich, *Origins of Terrorism: Tinjauan Psikologi Ideologi, Teologi, dan Sikap Mental*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003), hlm. 98.

⁷ Ahmad S. Rijal, "The Mufti-Mustafti approach to religious rehabilitation", *Counter Terrorist Trends and Analysis, RSIS*, Vol. 7, No. 2, 2015, hlm. 14-20.

Idris, menyampaikan bahwa pihaknya tidak mempunyai kekuatan yang cukup dan semuanya serba terbatas. Proses deradikalisasi tidak mudah, apalagi BNPT baru berdiri pada tahun 2010.⁸

Kurang maksimalnya deradikalisasi dibuktikan adanya salah satu mantan Napiter yang berasal dari Sumatera Utara telah kembali terlibat dalam aksi radikalisme dan terorisme, yakni Sibghotullah. Sebelumnya dia merupakan mantan terpidana terorisme kasus perampokan Bank CIMB Niaga Medan tahun 2010. Polri berhasil mengungkap keterlibatannya atas serangan terorisme ISIS tahun 2016 di Sarinah. Dia terlibat dalam mempengaruhi salah satu terduga teroris kasus bom Sarinah bernama Priyo Hadi Purnomo. Sibghotullah bersama rekannya Muhammad Soleh menyebarkan paham radikal ketika mereka berada dalam Lapas Porong Jawa Timur tahun 2014.⁹

Melihat sejarah perkembangan aksi radikalisme dan terorisme di Provinsi Sumatera Utara yang terjadi sejak tahun 2000 sampai dengan 2019, maka mayoritas para pelakunya saat ini sudah bebas kembali ke masyarakat. Status mantan Napiter tentu tidak dapat mereka hilangkan dan menjadi suatu stigma negatif yang timbul bagi masyarakat lingkungan sekitar mereka. Selain itu juga

⁸ Jerome Wirawan, "Serangan bom Surabaya: Program deradikalisasi dinilai gagal, BNPT tak terima", dalam <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44154828>, 18 Mei 2018, diakses pada 29 Juni 2010.

⁹ Poltak P. Nainggolan, *Ancaman ISIS di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), hlm. 141.

memunculkan kekhawatiran tersendiri di masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya mayoritas masyarakat Indonesia tidak setuju dan menolak adanya aksi radikalisme dan terorisme.¹⁰ Sedangkan berdasarkan sejarah secara global, banyak orang atau kelompok telah melakukan tindakan teroris ini setidaknya untuk waktu selama dua ribu tahun. Selama rentang waktu pengalaman manusia itu, perbuatan semacam itu telah dilakukan oleh bermacam-macam orang dengan agama yang berbeda-beda untuk mencapai beragam tujuan yang berbeda-beda pula.¹¹

Pada bulan Juni 2020, jumlah mantan Napiter di Provinsi Sumatera Utara telah bertambah menjadi 21 orang dari jumlah sebelumnya adalah 18 orang. Dengan bertambahnya jumlah mantan Napiter yang saat ini kembali ke tengah-tengah masyarakat Sumatera Utara, maka perlu mendapat perhatian dan uluran dari semua pihak pemerintahan dan elemen masyarakat. Hal tersebut diperlukan semata-mata agar mereka dapat melanjutkan kehidupan mereka menjadi lebih baik dan dapat diterima masyarakat sekitarnya, sehingga dapat menghilangkan niat mereka untuk kembali mengulangi kesalahan yang sama.¹² Berdasarkan penjelasan tersebut, perlu adanya kegiatan yang dapat memberikan pendekatan kepada mantan narapidana terorisme. Salah

satunya adalah penggalangan yang perlu melibatkan semua pihak, seperti BNPT, BIN, TNI dan Polri sebagai upaya untuk melakukan pencegahan radikalisme dan aksi terorisme.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui penjelasan secara deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah suatu metode dalam penelitian yang berorientasi pada gejala-gejala yang bersifat alamiah. Mengingat orientasinya demikian, maka sifatnya naturalistik dan mendasar serta tidak bisa dilakukan di laboratorium melainkan harus terjun di lapangan.¹³ Menurut Sugiyono, metode penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah. Sebagai lawannya adalah eksperimen, yang dalam hal ini, peneliti sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *puspositive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis bersifat induktif/kualitatif, dan hasilnya lebih menekankan makna daripada generalisasi.¹⁴

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan,

¹⁰ Wawancara dengan Ruruh Setyawibawa (Ketua Kominda Sumut), 23 Juni 2020.

¹¹ Walter Reich, *op.cit*, hlm. 338.

¹² Wawancara dengan Ruruh Setyawibawa (Ketua Kominda Sumut), 23 Juni 2020.

¹³ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches* (4th ed.), (California: Sage publication, 2014), hlm. 276.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif: Kualitatif dan R&D*, (Yogyakarta: Alfa Beta, 2012), hlm. 35

dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹⁵

Pengambilan data dilakukan dengan penggabungan sumber data, analisis data bersifat induktif/kualitatif. Data yang dikumpulkan berasal dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer didapatkan dari narasumber melalui kegiatan wawancara dan observasi kepada responden penelitian. Narasumber dalam penelitian ini adalah aparat yang terlibat dalam mengatasi terorisme pada unsur BIN, Komandan Satgas BAIS TNI, Kasat Intelijen Keamanan Polres Pelabuhan Belawan, Komandan Unit Intel Kodim 0201/BS dan Asintel Lantamal I Belawan. Sedangkan sumber sekunder didapatkan dari dokumen dan literatur lain yang mendukung penelitian ini. Data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara dan dokumen, kemudian diolah menggunakan *Software Nvivo 12 Plus*.¹⁶ Pengolahan yang dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya terdapat teori-teori yang digunakan sebagai acuan dalam mengupas kegiatan penggalangan.

Adapun teori-teori yang digunakan dalam mengupas penggalangan para mantan Napiter guna mencegah radikalisme dan terorisme di Provinsi

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi revisi)*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 6.

¹⁶ Agustinus Bandur, *Peneilitian Kualitatif Studi Multi Disiplin Keilmuan Dengan Nvivo 12 Plus*, (Bogor: Mitra Wacana Media, 2019), hlm. 152-153.

Sumatera Utara ini adalah teori penggalangan, teori deradikalisasi dan teori sinergitas. Dengan teori penggalangan akan membahas mengenai metode penggalangan yang dapat diterapkan. Pada penelitian ini berfokus pada pelaksanaan penggalangan yang melibatkan banyak pihak agar lebih maksimal. Penggalangan yang dilaksanakan menurut Yohanes, meliputi pola, teknik, taktik dan juga media yang sesuai. Mengingat penggalangan merupakan operasi psikologi, maka objek psikologis yang diperhatikan meliputi emosi, sikap, tingkah laku, opini dan motivasi (ESTOM). Berikut ditunjukkan diagram sarana penggalangan.¹⁷



Gambar 1. Sarana Penggalangan

Sumber: Wahyu Y. Saronto, *Intelijen (Teori Intelijen dan Pembangunan Jaringan)*, (Yogyakarta: ANDI, 2018).

Adapun teori deradikalisasi merupakan upaya yang dilakukan secara sistematis dan terprogram untuk mengembalikan sebuah pemikiran, sikap, dan perilaku radikal seseorang atau kelompok kepada kondisi normal atau tidak radikal. Hal ini merupakan respons terhadap kondisi kehidupan di tengah masyarakat dimana banyak individu

¹⁷ Y. Wahyu Saronto, *Intelijen (Teori Intelijen dan Pembangunan Jaringan)*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018), hlm. 66.

yang sudah terpapar paham radikal dan termanifestasikan ke dalam perilaku yang destruktif dan membahayakan bagi diri sendiri dan kehidupan di sekitarnya.¹⁸ Sedangkan teori sinergitas membahas bahwa dalam melakukan penggalangan harus dengan kerja sama dan koordinasi yang erat di antara *stakeholder* terkait.

Hasil penelitian ini nantinya akan mendeskripsikan atau mengkonstruksikan wawancara secara mendalam terhadap subjek penelitian yang sedang diteliti agar dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai Penggalangan Para Mantan Narapidana Teroris Guna Mencegah Radikalisme dan Terorisme di Provinsi Sumatera Utara.

Hasil dan Pembahasan

Dalam strategi pencegahan radikalisme, selain *hard approach* penting juga penggunaan *soft approach* yaitu berupa pembinaan terhadap masyarakat (untuk mengantisipasi potensi radikalisme) dan penggalangan terhadap napi teroris dan mantan napi teroris dengan melakukan upaya deradikalisasi baik secara sosial maupun individual serta mengawasi dan mengejar aliran dana (*follow the money*) teroris.¹⁹ Pada dasarnya kegiatan penggalangan intelijen terhadap para mantan Napiter di Sumatera Utara (Sumut) dilaksanakan secara sinergi

oleh beberapa penyelenggara intelijen negara di daerah. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Koordinasi Intelijen Negara menyatakan bahwa Binda merupakan koordinator penyelenggara Intelijen Negara di daerah. Komite Intelijen Daerah (Kominda) adalah forum koordinasi para pimpinan penyelenggara Intelijen Negara di daerah. Adapun yang menjadi Ketua Kominda provinsi adalah Kabinda dimana keanggotaannya terdiri dari para pimpinan Intelijen di daerah yaitu Intelijen TNI di daerah (Kodam, Lantamal dan Lanal), Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah, Intelijen Kejaksaan di daerah, Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik dan Intelijen Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian di daerah.

Penggalangan yang dilakukan terhadap para mantan Napiter di wilayah Sumut merupakan penggalangan yang bersifat terbatas karena sejak BNPT terbentuk pada tahun 2010 maka segala yang menyangkut terorisme menjadi tugasnya. Khusus terhadap para mantan Napiter telah masuk dalam program deradikalisasi oleh BNPT, baik yang diberikan sewaktu di LP maupun setelah para mantan Napiter bebas. Adapun program yang dapat diberikan kepada para mantan Napiter di luar penjara adalah wawasan kebangsaan, keagamaan dan kewirausahaan sesuai dengan kearifan lokal di daerahnya.

Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai metode yang tepat diterapkan

¹⁸ Najahan Musyafak, *Deradikalisasi NKRI (Pesan Damai dari Jawa Tengah)*, (Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2017), hlm. 11.

¹⁹ Ahmad Jazuli, "Strategi Pencegahan Radikalisme dalam rangka Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 10, No. 2, 2016, hlm. 207.

dalam penggalangan terhadap para mantan Napiter namun tetap menjaga hak-hak azasi para mantan Napiter yang telah dinyatakan bebas dari masa hukuman. Paramantan Napiter yang ada di Sumatera Utara masih perlu mendapatkan penggalangan dari semua komponen bangsa. Hal tersebut akan lebih optimal apabila dilakukan secara bersinergi oleh seluruh aparat keamanan dan elemen masyarakat.²⁰ Penyelenggaraan penggalangan perlu mengacu kepada program nasional yang telah dicanangkan pemerintah yaitu program deradikalisasi dimana yang menjadi *leading sector* adalah BNPT.²¹ Apabila aparat pertahanan dan keamanan negara seperti TNI dan Polri yang memiliki potensi sumber daya turut berpartisipasi dalam penggalangan para mantan Napiter, maka tentu hasil yang diharapkan akan lebih maksimal.

Berdasarkan teori deradikalisasi dari John G. Horgan, menyatakan bahwa deradikalisasi dibagi ke dalam dua komponen yaitu *behavioral disengagement* sebagai pengurangan atau penghentian keterlibatan fisik dalam aktivitas kekerasan atau aksi radikal dan *psychological disengagement* sebagai perubahan sikap atau keyakinan.²² Sedangkan menurut Dr. Petrus Reinhard Golose bahwa diperlukan penerapan

²⁰ Wawancara dengan Ruruh Setyawibawa (Ketua Kominda Sumut), 23 Juni 2020.

²¹ Wawancara dengan Andy Prasetyo (Kasubdit Bina Dalam Lapas Khusus Teroris BNPT), 8 Juli 2020.

²² John G. Horgan, "Deradicalization or Disengagement?: A Process in Need of Clarity and a Counterterrorism Initiative in Need of Evaluation", *Jurnal Internasional Psikologi Sosial*, Vol. 24, No. 2, 2009, hlm. 291-298.

soul approach (pendekatan jiwa) sebagai metode dalam deradikalisasi dengan tujuan reorientasi pemikiran lewat unsur budaya Islam, tanpa kekerasan. Proses reorientasi itu sendiri merupakan konversi atau membalikkan pemikiran radikal menjadi tidak radikal dengan menekankan pada perbaikan nilai-nilai moral.²³ Cakupan program deradikalisasi tidak hanya kepada napi, tetapi juga kepada keluarga napi. Sebab pada saat napi kembali ke masyarakat, kondisi-kondisi lingkungannya telah mendukung bagi perubahan yang terjadi dalam dirinya. Hal ini sekaligus mendorong mantan napi agar memberikan pencerahan kepada orang-orang disekitarnya dan membantu pemerintah untuk menghambat proses penyebaran radikalisme di masyarakat.²⁴ Atas pertimbangan hal tersebut di atas makakeduakomponenderadikalisasiperlu mendapat perhatian dari semua pihak. Untuk menghentikan atau memutuskan keyakinan radikal para mantan Napiter maka BNPT dapat bersinergi dengan para tokoh agama dan masyarakat sedangkan untuk menghentikan keterlibatan fisik dalam aktivitas kekerasan maka sumber daya yang dimiliki TNI dan Polri sangat berpotensi besar untuk melakukannya.

Menurut teori sinergi dari James A.F. Stoner menjelaskan bahwa tingkat kerja sama yang terbaik adalah sinergistik yaitu kerja sama yang tinggi, saling mempercayai, dan terpadu sehingga menghasilkan keluaran yang lebih

²³ Petrus Reinhard Golose, *Deradikalisasi Terorisme*, (Jakarta: CV. Aksara Simpati, 2009), hlm. 125.

²⁴ Saefudin Zuhri, *Deradikalisasi Terorisme*, (Jakarta: Daulat Press, 2017), hlm. 105.

besar dari penjumlahan hasil keluaran masing-masing pihak.²⁵ Apabila dalam penggalangan para mantan Napiter dilaksanakan secara sinergi maka diyakini tujuan dari program deradikalisasi akan tercapai, yang dalam hal ini, para mantan Napiter tersebut dapat sepenuhnya kembali mencintai NKRI dan Pancasila.

Adapun teori utama yang digunakan dalam pembahasan ini adalah teori penggalangan itu sendiri. Adapun metode dalam penggalangan itu menggunakan suatu pola, teknik, taktik dan media yang tersedia.²⁶

a. Pola Penggalangan

Adapun pola yang tepat digunakan dalam melakukan penggalangan terhadap para mantan Napiter di daerah Sumut adalah secara persuasif. Diperlukan adanya pendekatan lunak atau *soft approach*. Kegiatan pendekatan dapat dilakukan dengan berkunjung ke rumah-rumah para mantan Napiter baik secara berkala maupun secara dadakan. Kunjungan tersebut dapat diisi dengan pemberian bantuan sosial berupa materi atau Sembako. Disamping itu juga dapat menjalinkomunikasiaktifmengedepankan persaudaraan yang dapat memberikan sumbangan-sumbangan ide dan gagasan atau bimbingan dalam meningkatkan kemandirian dalam usaha para mantan Napiter.

b. Teknik Penggalangan

Adapun teknik penggalangan yang dapat digunakan adalah teknik

²⁵ James A.F. Stoner, *Management (Third Edition)*, (London: Prentice Hall, 1995), hlm. 101.

²⁶ Y. Wahyu Saronto, *op.cit*, hlm. 66.

propaganda. Propaganda adalah unsur utama operasi psikologi yaitu dilakukan dengan komunikasi yang disengaja untuk mempengaruhi suatu tingkah laku (*behaviour*).²⁷ Di era perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih dimana telah memasuki revolusi industri 4.0 maka dampak negatif yang ditimbulkan juga terasa di tengah-tengah kehidupan bernegara. Banyak situs dan akun media sosial yang melakukan propaganda dan radikalisme dunia maya. Untuk mencegah hal tersebut maka perlu dilakukan propaganda dari pihak pemerintah. Propaganda negatif atau berita hoaks dari pihak-pihak tidak bertanggung jawab harus dapat ditelusuri dan diatasi melalui patroli siber secara terus menerus selanjutnya perlu dilakukan klarifikasi dan penyampaian berita yang sebenarnya. Selain penyampaian propaganda melalui media sosial pihak penggalang juga dapat menyampaikan pesan-pesan positif secara langsung salah satunya melalui ceramah dan diskusi.

c. Taktik Penggalangan

Menurut teori intelijen, taktik penggalangan terdiri dari gerakan menarik, menekan, memutar balik, memecah belah dan adu domba. Untuk para mantan Napiter yang ada di daerah Sumut sebagian besar telah berubah menjadi lebih baik, sehingga yang perlu diterapkan dalam penggalangan adalah gerakan menarik dan menekan. Gerakan menarik dilakukan dengan tujuan agar mereka dapat kembali menjadi warga

²⁷ *Ibid*, hlm. 72.

yang setia kepada NKRI. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah melalui pembinaan atau bimbingan usaha mandiri yang diberikan oleh instansi-instansi pemerintahan yang ada di daerah.

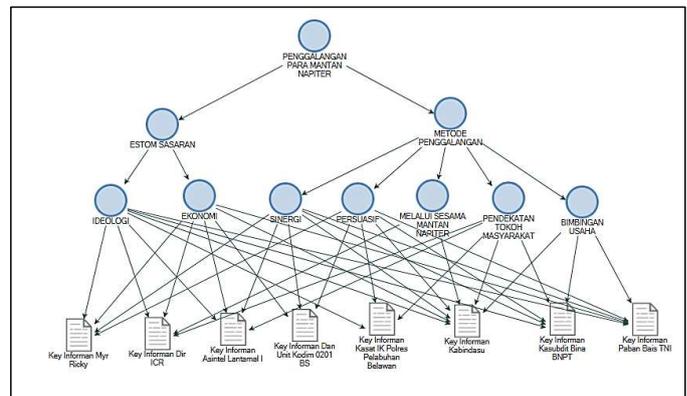
Sementara gerakan menekan yaitu menekan rasa dan pikiran tertutup bagi sebagian kecil sehingga paham radikalisme tidak muncul kembali. Gerakan menekan dapat dilakukan melalui pendekatan keluarga atau melalui tokoh-tokoh yang disegani mantan Napiter tersebut. Harapannya yang bersangkutan mulai resah dan meninggalkan pemahaman yang salah tersebut.

d. Media Penggalangan

Media penggalangan yang dapat dilakukan dalam penggalangan para mantan Napiter antara lain melalui kontak personal oleh aparat Intelijen/Keamanan dengan melakukan silaturahmi dengan para mantan Napiter. Disamping itu juga dapat melalui pendekatan aparatatur Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga terkait dan melalui keluarga dan tokoh masyarakat yang disegani. Penggunaan sarana teknologi informasi juga menjadi media yang mutlak ditempuh karena saat ini mayoritas masyarakat Indonesia bahkan dunia merupakan pengguna media sosial dan internet. Kementerian/lembaga terkait perlu bekerja ekstra dalam melakukan kontra terhadap berita-berita hoaks khususnya menyangkut masalah intoleransi dan radikalisme.

Secara umum semua narasumber menilai bahwa penggalangan yang tepat bagi para mantan Napiter adalah dengan pendekatan *soft approach* dan *soul approach* yaitu mengedepankan pendekatan dari hati atau akar rumput. Peran instansi di daerah dibutuhkan karena pertimbangan dari segi jarak lokasi dapat lebih dekat terhadap para mantan Napiter yang ada di wilayahnya.

Berikut hasil pengolahan data NVivo, yang menunjukkan proses kegiatan penggalangan yang dilaksanakan oleh peneliti kepada narasumber.

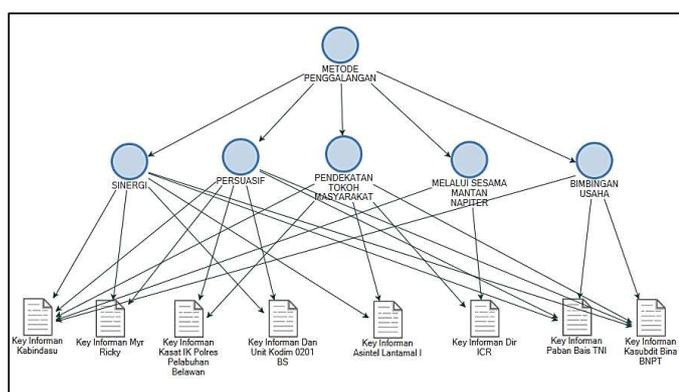


Gambar 2. Hasil pengolahan Nvivo

Sumber: Diolah oleh Peneliti

Gambar di atas menunjukkan bahwa penggalangan para mantan napiter dilakukan secara *soft approach* dan *soul approach* menggunakan metode penggalangan yang persuasif, saling mengingatkan antar mantan napiter, pendekatan dari tokoh masyarakat, para mantan napiter diberikan wawasan kewirausahaan, dan saling mendukung serta mengawasi dengan bersinergi antar pihak. Selanjutnya, dari segi psikologis objek yang difokuskan terkait bidang ideologi dan ekonomi. Hal ini dikarenakan

sebagian besar orang yang terlibat aksi terorisme adalah yang terkendala ekonomi dan lemahnya ideologi. Lebih detail terkait proses metode penggalangan dengan pendekatan psikologis yang dilaksanakan ditunjukkan pada Gambar 3 dan Gambar 4 di bawah ini.



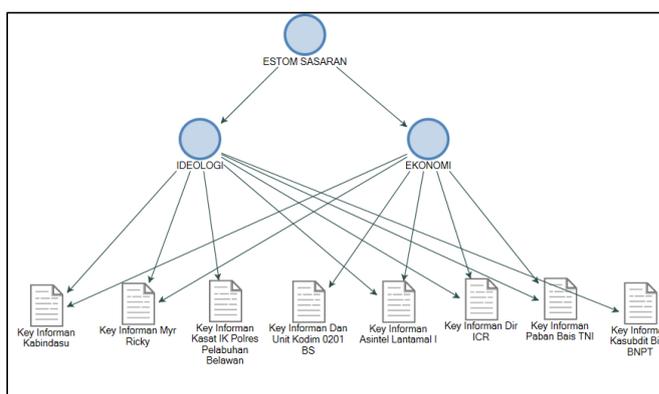
Gambar 3. Hasil Pengolahan Nvivo pada Metode Penggalangan

Sumber: Diolah oleh Peneliti

Para narasumber sebagian besar berpendapat bahwa dalam melakukan penggalangan terhadap para mantan Napiter diperlukan adanya sinergitas dengan semua elemen yang ada termasuk forum kemasyarakatan. Para mantan Napiter di daerah Sumut dinilai sebagian besar telah dapat menyesuaikan dengan kehidupan baru yang lebih baik. Oleh karena pola yang digunakan dalam penggalangan dengan cara persuasif atau pendekatan *soft approach* dan *soul approach*.

Sebagian para mantan Napiter masih tertutup dan belum mau mengakui NKRI maka diperlukan upaya dengan menggunakan sesama para mantan Napiter yang dulunya memiliki jaringan yang sama. Disamping itu, pendekatan melalui keluarga atau tokoh-tokoh

yang disegani dan dihormati juga dapat ditempuh. Hal tersebut tetap memerlukan perhatian dari intelijen sehingga dapat melakukan fungsi pengawasan. Dengan demikian, segala perkembangan yang ada dimonitor demi tujuan mewujudkan terciptanya situasi keamanan yang kondusif, salah satunya dengan adanya pencegahan berkembangnya paham radikalisme di daerah Sumut.



Gambar 4. Hasil Pengolahan Nvivo pada Sasaran bidang Psikologis

Sumber: Diolah oleh Peneliti

Indikator keberhasilan kegiatan penggalangan adalah dapat merubah ESTOM sasaran penggalangan. Sasaran penggalangan adalah manusia, dalam hal ini para mantan Napiter yang memiliki akal budi dan perasaan. Operasi atau kegiatan penggalangan dimaksudkan sebagai operasi untuk mengubah atau mengondisikan emosi, sikap, tingkah laku, opini, dan motivasi manusia sehingga operasi ini bisa juga disebut dengan operasi psikologi. Kelima faktor ESTOM tersebut pada dasarnya memiliki saling keterkaitan yang sangat kuat bahkan tidak terpisahkan.

Dalam kegiatan penggalangan, faktor uang atau ekonomi menjadi

permasalahan klasik. Terutama bagi sasaran yang akan digalang, masalah ekonomi sangat berpengaruh besar dalam merubah ESTOM seseorang. Sementara faktor ideologi menjadi faktor terbesar lainnya yang perlu mendapat perhatian seluruh masyarakat Indonesia khususnya Sumatera Utara.

Dengan mengacu kepada teori deradikalisasi John G. Horgan, yang menyatakan bahwa deradikalisasi dibagi ke dalam dua komponen yaitu *behavioral disengagement* sebagai pengurangan atau penghentian keterlibatan fisik dalam aktivitas kekerasan atau aksi radikal dan *psychological disengagement* sebagai perubahan sikap atau keyakinan.²⁸ Apabila dihadapkan pada situasi bahwa masih adanya temuan keterlibatan sebagian kecil mantan Napiter melakukan aksi radikal terorisme maka perlu menjadi bahan evaluasi bahwa para mantan Napiter masih perlu pengawasan dan pembinaan di luar Lapas. Hal ini sejalan dengan pernyataan Debora bahwa masih banyak aksi terorisme yang terjadi disebabkan oleh pelaku-pelaku sebelumnya.²⁹

Adapun sebagian besar para mantan Napiter sebelumnya telah mendapat program deradikalisasi dari BNPT di dalam Lapas, hanya saja masih ada sebagian kecil dari mereka yang belum mendapatkannya

²⁸ John G. Horgan, "Deradicalization or disengagement?: A process in need of clarity and a counterterrorism initiative in need of evaluation", *Perspectives on Terrorism*, Vol. 2, No. 4, 2008, hlm. 3-8.

²⁹ Debora Sanur, "Upaya Penanggulangan Terorisme ISIS di Indonesia dalam Melindungi Keamanan Nasional", *Jurnal Politica*, Vol. 7, No. 1, 2016, hlm. 25-44.

di dalam Lapas karena keterbatasan kapasitas ruang Lapas Khusus Terorisme. Untuk itulah maka diperlukan peran intelijen dalam melakukan penggalangan di daerah tempat tinggal para mantan Napiter tersebut terutama bagi mantan Napiter yang belum sempat mendapat program deradikalisasi. Hal tersebut sangat relevan dilaksanakan karena didukung sumber daya aparat intelijen yang ada di daerah.

Menurut teori sinergitas, setiap permasalahan yang ada dalam suatu bangsa dan negara tidak ada yang dapat diselesaikan hanya dengan kekuatan dan kemampuan satu komponen saja. Namun dibutuhkan sinergitas dan kerja sama dua atau lebih komponen bangsa termasuk permasalahan radikalisme dan terorisme yang ada.

Demikian halnya dalam pembinaan dan penggalangan para mantan Napiter sangat dibutuhkan sinergitas yang kuat dan solid. Intelijen dalam melaksanakan tugasnya memerlukan kerja sama dari *stakeholder* lainnya baik aparat pemerintahan maupun masyarakat.

Untuk komunitas intelijen di daerah, terdiri dari beberapa instansi baik BIN, TNI, Polri maupun kementerian dan lembaga lainnya termasuk forum kemasyarakatan seperti Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT). Apabila semua elemen tersebut saling berkoordinasi dan menjalin komunikasi yang erat maka hasil penggalangan terhadap para mantan Napiter tersebut akan maksimal sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah pusat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa metode penggalangan yang dapat diterapkan antara lain, pertama sesuai teori penggalangan itu sendiri yaitu dengan suatu pola, teknik, taktik, dan media yang tersedia. Metode lainnya yang selaras adalah sesuai teori deradikalisasi dan teori sinergitas. Dari ketiga teori tersebut terdapat kesamaan dalam menentukan pola yang tepat bagi penggalangan para mantan Napiter yaitu diperlukan pendekatan persuasif atau *soft approach*, dan juga pendekatan dari hati ke hati atau jiwa (*soul approach*) yang diyakini dapat menyentuh sampai ke hati nurani. Namun tetap dibutuhkan ketegasan dalam hal taktik penggalangan yaitu menekan rasa atau pemahaman radikalisme dan terorisme agar tidak muncul kembali, sehingga dapat menghentikan perkembangan radikalisme dan terorisme tersebut. Dalam hal teknik penggalangan dibutuhkan adanya propaganda putih melalui penyiaran berita-berita positif terkait dasar negara Pancasila dan UUD 1945 serta adanya *counter* terhadap berita-berita hoaks.

Rekomendasi

Penarikan kesimpulan dari pembahasan yang sudah dijelaskan sebelumnya memuat rekomendasi untuk dijadikan bahan pertimbangan oleh pihak terkait. Penelitian yang telah dilaksanakan dapat membuktikan bahwa teori Penggalangan,

teori Deradikalisasi, dan teori Sinergitas, dapat digunakan sebagai bahan acuan atau alat untuk menganalisis kondisi mantan narapidana teroris melalui pendekatan, baik dari sisi psikologis dan sosial. Penggunaan *tools* pengolahan data dengan NVivo untuk triangulasi data (keabsahan data) dan untuk menganalisis data secara terstruktur, tajam dan komprehensif sehingga lebih maksimal dalam analisisnya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk digunakan pada penelitian kualitatif lainnya. Penggalangan para mantan Napiter dapat terus dilaksanakan dengan menggunakan pola, taktik, teknik dan media yang tersedia. Salah satu tujuan penggalangan adalah didukungnya program deradikalisasi yang dicanangkan oleh pemerintah yang membutuhkan adanya sinergitas melalui koordinasi dan komunikasi yang baik antara aparat pemerintah dan elemen masyarakat lainnya.

Penelitian ini membahas mengenai metode penggalangan intelijen yang dapat diterapkan terhadap para mantan Napiter. Dalam hal ini, metode penggalangan tersebut dikupas dengan menggunakan teori penggalangan dan dikolaborasikan dengan teori deradikalisasi dan teori sinergitas.

Daftar Pustaka

Buku

- Bakti, Agus S. 2016. *Deradikalisasi Dunia Maya*. Jakarta: Daulat Press.
- Bandur, A. 2019. *Penelitian Kualitatif Studi Multi Disiplin Keilmuan Dengan Nvivo 12 Plus*. Bogor: Mitra Wacana Media.
- Creswell, J. W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches (4th edition)*. California: Sage Publication.
- Golose, P. R. 2009. *Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
- Moleong J. Lexy. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Musyafak, Najahan. 2017. *Deradikalisasi NKRI (Pesan Damai dari Jawa Tengah)*. Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa.
- Reich, Walther. 2003. *Origins of Terrorism: Tinjauan Psikologi, Ideologi, Teologi, dan Sikap Mental*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Stoner, James A.F 1986. *Management. (Third Edition)*. (London: Prentice Hall, 1995).
- Saronto, Y. Wahyu. 2018. *Intelijen (Teori Intelijen dan Pembangunan Jaringan)*. Yogyakarta: ANDI.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif: Kualitatif dan R&D*. Yogyakarta: Alfa Beta.
- Suripto, RM. 2010. *Kegiatan Intelijen Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan (Intelijen sebagai Indera dan Pisau Analisis)*. Jakarta: Sumber Ilmu Jaya.
- Zuhri, Saefudin. 2017. *Deradikalisasi Terorisme: Menimbang Perlawanan Muhammadiyah dan Loyalitas Nahdlatul Ulama*. Jakarta: Daulat Press.

Jurnal

- Horgan, John G. 2008. "Deradicalization or disengagement? A process in need of clarity and a counterterrorism initiative in need of evaluation". *Perspectives on Terrorism*. Vol. 2. No.4.
- Jazuli, Ahmad. 2016. *Strategi Pencegahan Radikalisme dalam rangka Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*. Vol. 10. No. 2.
- Rijal, Ahmad S. 2015. The Mufti-Mustafti approach to religious rehabilitation. *Counter Terrorist Trends and Analysis, RSIS*. Vol. 7. No. 2.
- Sanur, Debora. 2016. Upaya Penanggulangan Terorisme ISIS di Indonesia dalam Melindungi Keamanan Nasional". *Jurnal Politica*. Vol. 7. No. 1.

Website

- Amirullah & Imam H. "BNPT Minta Pemda Bantu 600 Mantan Teroris Cari Pekerjaan, dalam tempo.co, <https://nasional.tempo.co/read/1068986/bnpt-minta-pemda-bantu-600-mantan-teroris-cari-pekerjaan>, 12 Maret 2018, diakses pada 15 April 2020.
- Halim, Devina, "KALEIDOSKOP 2019: Sejumlah Teror yang Guncang Indonesia, Bom Bunuh Diri hingga Penusukan Wiranto", dalam kompas.com, <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/25/07485601/kaleidoskop-2019-sejumlah-teror-yang-guncang-indonesia-bom-bunuh-diri-hingga?page=all>, 25 Desember 2019, diakses pada 25 November 2020.
- Wirawan, J., "Serangan bom Surabaya: Program deradikalisasi dinilai gagal, BNPT tak terima", dalam BBC Indonesia, dalam <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44154828>, 18 Mei 2018, diakses pada 29 Juni 2010.